BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung terletak pada posisi 107º36’ Bujur Timur dan 6º55’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Secara morfologi regional, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung”, yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini terletak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota,

yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

4.1.2 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh suatu badan yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan. Fungsi dan peranan KPU sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena penyelenggara negara terpilih melalui hasil kerja KPU menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Posisi dan peranan KPU tersebut mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi, dewasa ini dan masa datang. KPU memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Melihat perkembangan politik dan dinamika penyelenggaraan Pemilu serta meningkatnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dibentuk sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/815/SJ tanggal 25 April 2002 tentang pembentukan Sekretariat Pelaksana Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang pada awalnya disebut Perwakilan Sekretariat Umum (Setum) KPU Kota Bandung. Sekretariat umum maupun perwakilan sekretariat memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilu.

Struktur organisasi perwakilan Setum KPU Kota Bandung pada waktu itu sangat sederhana terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Eselon III-a, 2 (dua) Kepala Sub Bagian Eselon IV-a. Perwakilan setum KPU Kota Bandung pertama kali dipimpin oleh John Hilbert Siregar, SH. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember tahun 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 280/Kep 1697-B/Peg/2002 tanggal 27 Desember 2002. Selain melantik Sekretaris, Gubernur Jawa Barat juga melantik 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk sebagai Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum, serta Djudju Sjamsudin, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan staf PNS, Walikota Bandung memperbantukan PNS yang berasal dari unit-unit kerja baik di lingkup Setda Kota Bandung maupun Badan/Dinas Kota Bandung, dan berkantor di gedung ex Departemen Penerangan (Diskominfo) di Jalan Soekarno Hatta No. 260 Bandung. Untuk memenuhi Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, Perwakilan Sekretaris Umum KPU Kota Bandung ditugaskan untuk memfasilitasi

tim seleksi pembentukan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dari tanggal 1 April sampai 13 Juni 2003 untuk menetapkan keanggotaan Komisi Pemlihan Umum Kota Bandung sebanyak 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 216/tahun 2003 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Bandung Jawa Barat, dan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 801.02/96-BA/JB/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003 tentang penetapan Anggota KPU Kota Bandung periode 2003-2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ir. Benny Moestofa (Ketua);
2. Andri Perkasa Kantaprawira (Anggota);
3. Drs. Yusi Hasibuan (Anggota);
4. Iin Endah Setiawati, SIP (Anggota);
5. Drs. Heri Sapari (Anggota).

Pada tahun 2003 ini pula Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003.

Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami perubahan nama menjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut maka perwakilan sekretariat umum Kota Bandung berubah nama menjadi Sekretariat KPU Kota Bandung, dan berdasarkan SK KPU Jawa Barat No. 161/UP-JB/II/2004 tanggal 9 Februari 2004 maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandung terdiri dari :

1. Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk sebagai Kasubbag Hukum dan Hubungan Masyarakat;
2. Djudju Samsudin, S.Sos sebagai Kasubbag Program;
3. Dedi Suhadin sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara;
4. Asep Hadiana SH sebagai Kasubbag Umum.

KPU Kota Bandung dibantu sekretariat bekerja penuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2004 yang tidak hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif tetapi juga menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 merupakan pemilu yang paling rumit karena untuk pertama kalinya penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan memilih langsung Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dengan 5 (lima) pasangan calon, namun karena tidak ada pasangan yang mencapai 50% maka dilaksanakan putaran ke-II pada tanggal 20 September 2004 dengan 2 (dua) calon pasangan dengan suara terbanyak.

Pada tahun 2007, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomenklatur struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berubah, maka struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menjadi :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dijabat oleh Drs. Yayan Ruyandi;
2. Sub Bagian Program dan Data dijabat oleh Edi Juhendi, S.IP;
3. Sub Bagian Teknis dan Hupmas dijabat oleh Andri nurdin, AP, S.Sos, M.Si;
4. Sub Bagian Hukum dijabat oleh Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk

Tahun 2008 KPU Kota Bandung melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dengan mengakomodir calon perseorangan, seiring pula dengan berakhirnya masa Jabatan anggota KPU Kota Bandung periode 2003-2008, maka selain melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga Sekretariat KPU Kota Bandung memfasilitasi tim seleksi untuk menetapkan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terpilih

periode 2008-2013, yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Jawa Barat Nomor 166/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008, yang terdiri dari :

1. Drs. Heri Sapari (Ketua)
2. Evie Ariadne Shinta D, Dra, M.Pd (Anggota)
3. Apipudin, S.S (Anggota)
4. Drs. Yusi Hasibuan (Anggota)
5. Rifqi Alimubarok, S.Ag, M.Si (Anggota)

Pada tahun 2010 terjadi pergatian Ketua KPU Kota Bandung yang dijabat oleh Drs, Heri Sapari kepada Apipudin, SS. berdasarkan Keputusan KPU Jabar. Pada tahun 2013 setelah pelaksanaan Pemilihan walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2013, berakhir pula masa jabatan anggota KPU periode 2008-2013, dan Sekretariat KPU Kota Bandung memfasilitasi tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kota Bandung hinggai 10 besar, yang akan menjalani uji kelayakan dari KPU Jawa Barat untuk ditetapkam 5 (lima) orang anggota KPU Kota Bandung periode 2013-2018. Berdasarkan Keputusan KPU Jawa Barat No. 222/Kpts/KPU-Prov-011/2013 tanggal 20 Desember 2013, terdiri dari:

1. Rifqi Alimubarok, S.Ag.M.Si (Ketua)
2. Akhmad Roziqin, M.Ag (Anggota)
3. Apipudin, S.Si (Anggota)
4. Suharti (Anggota)
5. Budi Tresnayadi, SH, MH (Anggota)

Selama rentang waktu tahun 2003-2013 Sekretaris KPU Kota Bandung mengalami pergantian sebanyak 7 (tujuh) kali sebagai berikut :

1. Joh n Hilbert Siregar, SH 2002-2003
2. Drs . Soedarjo Sadikin, MM 2003-2006
3. Drs. Ismail Ekawijaya, Amk, M.Pd 2006-2007
4. De di Suhadin 2007-2008
5. Ru di Sundaya, SH 2008-2012
6. Mo mon Setiawan, SH, M.Si 2012-2013 (Plt.)
7. Sla met Agus Priono, SH, M.Si 2013-sekarang

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sebagai pelaksana Pemilu di tingkat Kota Bandung mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Walikota disamping juga mempunyai kewajiban. Tugas dan wewenang KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kab./Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab./Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kab./kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan walikota meliputi :

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/ walikota dalam wilayah kerjanya;
e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. merima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

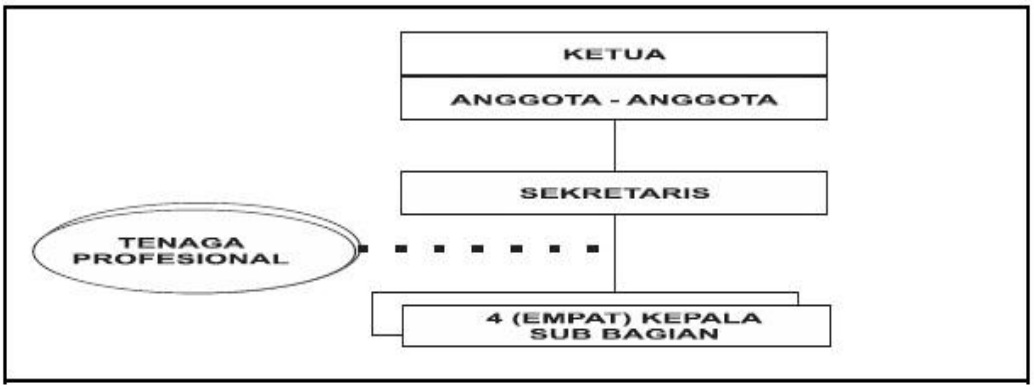
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden,calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Bandung, dibentuk sekretariat KPU Kota Bandung dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

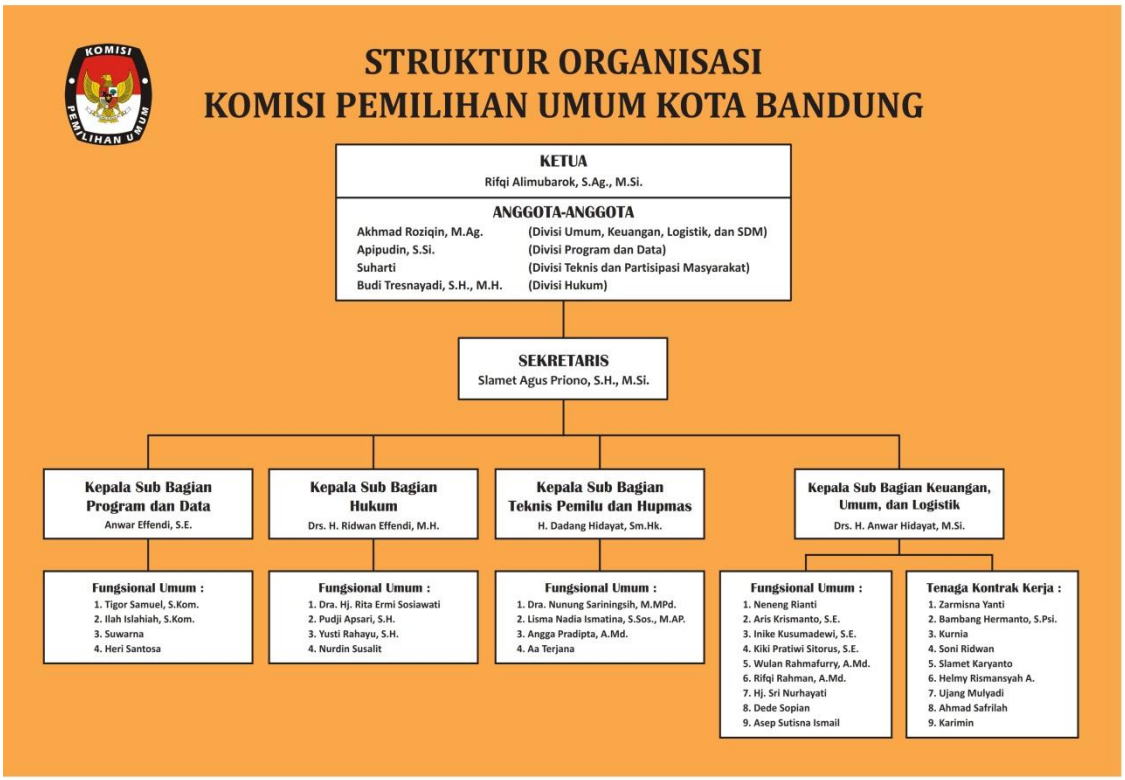
Gambar 4.1
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kota Bandung dibantu oleh Sekretariat, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar beriku ini.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, 2018

4.1.3 Hasil Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota Bandung 2018

Pemilihan Umum Wali Kota Bandung 2018 (selanjutnya disebut Pilwako Bandung 2018 atau Pilwalkot Bandung 2018) akan dilanksanakan pada 27 Juni 2018, mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2019–2024. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga di Bandung yang dilakukan secara

langsung menggunakan sistem pencoblosan. Adapun calon wali kota Bandung pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Nurul Arifin - Chairul Yaqin Hidayat di usung oleh PKB, Partai Demokrat dan Partai Golkar
2. Yossi Irianto - Aries Supriatna, diusung oleh Partai NasDem, Partai Hanura, PDI-P dan PPP.
3. Oded Muhammad Danial - Yana Mulyana, Partai Gerindra dan PKS

Adapun perolehan Suara pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2018

A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH AKHIR
1	2	3	34
A.	DATA PEMILIH		
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	826,393
		PR	832,624
		JML	1,659,017
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	1,551
		PR	1,419
		JML	2,970
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	20,134
		PR	22,220
		JML	42,354
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	848,078
		PR	856,263
		JML	1,704,341
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	608,621
		PR	655,136
		JML	1,263,757
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	1,361
		PR	1,237
		JML	2,598
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	18,685
		PR	20,832
		JML	39,517
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	628,667
		PR	677,205
		JML	1,305,872
C	TINGKAT PARTISIPASI	LK	74.13%
		PR	79.09%
		JML	76.62%

Sumber: (KPU Kota Bandung 2018)

Data diatas menunjukkan bahwa saat ini pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018 terjadi peningkatan dimana berdasarkan data tabel diatas data pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan daftar pemilih tetap, ada juga pemilih yang menggunakan surat keterangan untuk mendapatkan hak pilihnya karena belum memiliki KTP elektronik. Meskipun demikian minat pemilih di kota Bandung terlihat meningkat walaupun mereka hanya menggunakan surat keterangan dalam mengikuti pemilihan wali Kota Bandung 2018.

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa persentase tingkat partisipasi pemilih di kota Bandung terlihat sudah meningkat yaitu diantara laki-laki 74,13 % dan perempuan 79.09 % serta jumlah tingkat Partisipasi secara keseluruhan mencapai 76,62%, hal tersebut dihitung bedasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018. Berdasarkan data diatas perbandingan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan wali kota Bandung sudah meningkat dari pemilihan wali kota Bandung sebelumnya yaitu tahun 2013 lalu.

Pada tahun 2018 ini tingkat partisipasi pemilih perempuanlebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih laki-laki, pemilih perempuan tingkat partisipasinya sekitar 79,09% dari 856.263 pemilih hanya 179.058 pemilih perempuan yang tidak mengguanakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota Bandung, sedangkan sisanya yaitu 677.205 pemilih perempuan menggunakan hak pilihnya. Sedangakan pemilih laki-laki dari 848.078 pengguna hak pilih hanya 628.667 saja yang menggunakan hak pilihnya yakni sekitar 74,13% saja yang

menggunakan hak pilihnya, hal ini tentunya berbedadari tahun 2013, adapun data tingkat Partisipasi pemilih pada tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Bandung tahun 2013

NO.	URAIAN		
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH AKHIR
1	2	3	34
A.	**DATA PEMILIH**		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	829,565
		PR	827,841
		JML	1,657,406
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan/pengguna KTP atau Identitas Lainnya	LK	3,112
		PR	2,669
		JML	5,781
	3. Jumlah Pemilih (1+2)	LK	832,677
		PR	830,510
		JML	1,663,187
B.	**PENGGUNA HAK PILIH**		-
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	468,194
		PR	529,232
		JML	997,426
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan/pengguna KTP atau identitas lainnya	LK	3,112
		PR	2,669
		JML	5,781
	3. jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	471,306
		PR	531,901
		JML	1,003,207
C.	**PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT**	LK	56.60%
		PR	64.05%
		JML	60.32%

Sumber: KPU Kota Bandung, hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2013

Data diatas menunjukan bahwa pada tahun 2013 lalu tingkat Partisipasi pemilih hanya 60,32 % saja dengan rincian partisipasi pemilih laki-laki 56,60% dan perempuan 64,05% saja, hal ini tentu saja berbeda dengan tahun 2018 dimana terjadi peningkatan sekitar 16,3 %. Dari data tersebut maka dapat dikatakan pada

tahun 2018 ini minat pemilih di kota Bandung dalam memilih wali kota meningkat dari tahun 2013 lalu.

Adapun rincian hasil pemilihan wali kota bandung tahun 2018 berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2018 di kecamatan Andir dan Antapani berdasarkan formulir Model DA1-KWK

A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		ANDIR	ANTAPANI
1	2	3	4	5
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	33,916	25,433
		PR	34,103	26,134
		JML	68,019	51,567
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	68	18
		PR	91	22
		JML	159	40
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	949	789
		PR	1,076	818
		JML	2,025	1,607
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	34,933	26,240
		PR	35,270	26,974
		JML	70,203	53,214
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	23,950	19,464
		PR	25,948	21,151
		JML	49,898	40,615
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	42	18
		PR	68	22
		JML	110	40
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	832	789
		PR	976	818
		JML	1,808	1,607
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	24,824	20,271
		PR	26,992	21,991
		JML	51,816	42,262
C	TINGKAT PARTISIPASI	LK	71.06%	77.25%
		PR	76.53%	81.53%
		JML	73.81%	79.42%

Sumber: KPU Kota Bandung 2018

Berdasarkan tabel diatas tingkat partisipasi pemilih pada kecamatan andir dan antapani berkisar antara 73,81% dan 79,42% dengan rincian partisipasi pemilih laki-laki 71,06% di andir dan 77,25% di antapani dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa minat pemilih di kecamatan antapani dan andir lebih tinggi dari

pada mereka yang tidak mau menggunakan hak pilihnya, dari 70.203 pemilih di kecamatan andir hanya 18.387 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan di kecamatan Antapani dari 53.214 pemilih hanya 952 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari data diatas bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki, data tersebut memberikan gambaran bahwa pemilih laki-laki masih kurang dalam berpartisipasi pada pemilihan wali kota Bandung. Di kecamatan andir partisipasi pemilih laki-laki hanya 71,06 % saja tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi Komisi Pemilihan Umum kota Bandung agar meningkatkan minat pemilih laki-laki di kecamatan andir.

Sedangkan di kecamatan Antapani Partisipasi pemilih laki-laki hanya 77,25% saja berbeda jauh dengan partisipasi pemilih perempuannya yaitu 81,53%, perbedaan ini menunjukan bahwa partisipasi pemilih perempuan di kecamatan Antapani persentasenya lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki, data tersebut menunjukan bahwa minat pemilih laki-laki masih kurang dalam mengikuti pemilihan wali kota Bandung ini terlihat dari 26.240 pemilih laki-laki hanya 21,991 yang menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data diatas tingkat partisipasi pemilih perempuan cukup tinggi di karenakan banyaknya jumlah pemilih perempuan selain ditopang dari banyaknya jumlah pemilih perempuan dikota Bandung tingkat partisipasi pemilih perempuan ini cukup tinggi hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemilih perempuan pada pemilihan wali kota Bandung, selain itu hal ini bisa saja terjadi karena pemilih laki-laki lebih sibuk dengan pekerjaannya.

Berikut ini adalah tabel data tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan wali kota Bandung berdasarkan kecamatan yang ada di kota Bandung tahun 2018

Tabel 4.4
Hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2018 berdasarkan formulir Model DA1-KWK di kecamatan Arcamanik, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, dan Batu Nunggal

			RINCIAN						
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		ARCAMANIK	ASTANA ANYAR	BABAKAN CIPARAY	BANDUNG KIDUL	BANDUNG KULON	BANDUNG WETAN	BATUNUNGGAL
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
A.	DATA PEMILIH								
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	25,087	26,715	42,941	19,909	46,133	9,420	42,023
		PR	25,234	26,819	41,731	20,252	44,885	10,212	40,822
		JML	50,321	53,534	84,672	40,161	91,018	19,632	82,845
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	42	20	16	9	47	58	100
		PR	29	29	23	21	39	60	60
		JML	71	49	39	30	86	118	160
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	928	333	1,707	471	573	250	863
		PR	1,006	355	1,955	517	671	286	903
		JML	1,934	688	3,662	988	1,244	536	1,766
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	26,057	27,068	44,664	20,389	46,753	9,728	42,986
		PR	26,269	27,203	43,709	20,790	45,595	10,558	41,785
		JML	52,326	54,271	88,373	41,179	92,348	20,286	84,771
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	18,188	18,767	31,648	14,539	33,846	6,838	30,727
		PR	19,634	20,181	32,592	15,716	34,957	7,474	32,289
		JML	37,822	38,948	64,240	30,255	68,803	14,312	63,016
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	42	18	16	7	28	43	95
		PR	28	28	23	11	29	25	52
		JML	70	46	39	18	57	68	147
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	871	307	1,614	468	571	224	831
		PR	988	323	1,861	514	666	258	877
		JML	1,859	630	3,475	982	1,237	482	1,708
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	19,101	19,092	33,278	15,014	34,445	7,105	31,653
		PR	20,650	20,532	34,476	16,241	35,652	7,757	33,218
		JML	39,751	39,624	67,754	31,255	70,097	14,862	64,871
C	TINGKAT PARTISIPASI	LK	73.30%	70.53%	74.51%	73.64%	73.67%	73.04%	73.64%
		PR	78.61%	75.48%	78.88%	78.12%	78.19%	73.47%	79.50%
		JML	75.97%	73.01%	76.67%	75.90%	75.91%	73.26%	76.52%

Sumber: KPU Kota Bandung 2018

Data diatas menunjukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di 7 kecamatan tersebutcukup besar yaitu berkisar antara 75,97% di kecamatan arcamanik dengan rincian 73.30% partisipasi pemilih laki-laki dan 78,61% partisipasi pemilih perempuan, berdasarkan hal tersebut tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih laki-laki.

Hasil yang sama juga terjadi dikecamatan astana anyar dan bababkan ciparay dimana tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih besar dibandingkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki namun tingkat partisipasi pemilih berdasarkan persentase keseluruhan didua kecamatan ini berkisar anatar 73,01 % di kecamatan Astana Anyar dan 76,67% di kecamatan Babakan Ciparay, hal ini menjadi kebanggan tersendiri walaupun tingkat partisipasi pemilih laki-laki masih dibawah perempuan namun tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan wali kota Bandung di dua kecamatan tersebut sudah meningkat.

Sedangkan di kecamatan Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, dan kecamatan Batu Nunggal tingkat partisipasi pada pemilihan wali kota Bandung berkisar antara 73,26 % dan 76,52% dengan rincian 73,26% di kecamatan Bandung Wetan, 75,90% di kecamatan Bandung Kidul, 75,91% di kecamatan Bandung Kulon dan 76,52% dikecamatan Batu Nunggal tingkat partisipasi pemilih ini masih terlihat pemilih perempuan dalam pemilihan wali kota bandung lebih besar dibandingkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki.

Berdasarkan data persentase pemilih perempuan berkisar antara 73,47% sampai 79,50% dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan hak pilihnya dibandingkan pemilih laki-laki padahal jumlah

penduduk laki-laki pada 4 kecamatan tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih perempuan.

Tabel 4.5
Hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2018 berdasarkan formulir Model DA1-KWK di kecamatan Bojongloas Kaler, Bojongloa Kidul, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, dan Cicendo

A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BOJONGLOA KALER	BOJONGLOA KIDUL	BUAHBATU	CIBEUNYING KALER	CIBEUNYING KIDUL	CIBIRU	CICENDO
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH								
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	41,877	29,131	32,643	23,575	37,420	23,221	32,369
		PR	40,849	27,891	33,071	24,328	38,192	23,015	33,104
		JML	82,726	57,022	65,714	47,903	75,612	46,236	65,473
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	102	42	107	54	47	37	36
		PR	82	26	108	47	35	34	37
		JML	184	68	215	101	82	71	73
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	485	661	1,047	489	1,140	604	588
		PR	532	702	1,143	498	1,176	648	653
		JML	1,017	1,363	2,190	987	2,316	1,252	1,241
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	42,464	29,834	33,797	24,118	38,607	23,862	32,993
		PR	41,463	28,619	34,322	24,873	39,403	23,697	33,794
		JML	83,927	58,453	68,119	48,991	78,010	47,559	66,787
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	31,919	21,183	24,286	17,119	27,961	18,318	23,217
		PR	32,812	22,056	26,442	19,088	30,854	19,326	25,484
		JML	64,731	43,239	50,728	36,207	58,815	37,644	48,701
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	96	36	97	41	44	37	33
		PR	74	26	98	42	35	33	34
		JML	170	62	195	83	79	70	67
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	482	651	1,025	474	800	603	586
		PR	522	694	1,133	484	846	648	653
		JML	1,004	1,345	2,158	958	1,646	1,251	1,239
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	32,497	21,870	25,408	17,634	28,805	18,958	23,836
		PR	33,408	22,776	27,673	19,614	31,735	20,007	26,171
		JML	65,905	44,646	53,081	37,248	60,540	38,965	50,007
C	TINGKAT PARTISIPASI	LK	76.53%	73.31%	75.18%	73.12%	74.61%	79.45%	72.25%
		PR	80.57%	79.58%	80.63%	78.86%	80.54%	84.43%	77.44%
		JML	78.53%	76.38%	77.92%	76.03%	77.61%	81.93%	74.88%

Sumber: (KPU Kota Bandung 2018)

Data diatas menunjukan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki berdasarkan data dari 7 kecamatan tersebut yaitu berkisar antara 72,25% sampai dengan 79,45% persentase terendah berada pada kecamatan Cicendo yaitu 72,25%, dari 32,993 pemilik hak suara yang menggunakan hak pilihnya sekitar 23.836 pemilik hak suara sedangkan sisanya 9.157 pemilik hak suara tidak menggunakan hak pilihnya.

Kemudian dikecamatan bojongloa kaler tingkat partisipasi pemilih juga masih di dominasi oleh pemilih perempuan yaitu sekitar 80,57% dari 41.463 pemilik hak suara hanya 8.055 pemilik hak suara yang tidak menggunakan hak pilihnya sedangkan sisanya yaitu 33.408 pemilik hak suara menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018. Sedangkan pemilih laki-laki dari 42.464 hanya 32.497 pemilik hak suara yang menggunakan hak pilihnya sedangkan sisanya yaitu 9967 pemlik hak suara tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018, dari data tersebut terlihat jelas bahwa pemilih laki-laki lebih benyak yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu dikecamatan bojongloa kidul dan buahbatu persentase pemilih perempuan juga masih tinggi yaitu antara 79,58% di kecamatan bojongloa kidul dan 80,63% di kecamatan buahbatu hal ini menunnjukan bahwa pemilih perempuan lebih banyak yang mnggunakan hak pilihnya sedangkan pemilih laki-laki hanya 73,31% di kecamatan bojongloa kidul dan 75,18% di kecamatan buah batu yang menggunakan hak pilihnya data diatas menujukan pemilih laki-laki di kecamatan bojongloa kidul dari 29.834 pemilik hak suara yang menggunakan hak pilihnya 22.776 sedangkan sisanya yaitu 7.058 pemilik hak suara tidak menggunakan hak pilihnya sedangkan di kecamatan buahbatu jumlah pemilih laki-laki yang tidak menggunakan hak pilihnya dari 33.979 pemilik hak suara sekitar 8571 tidak menggunakan hak pilihnya.

Seadangkan pada kecamatan cibeunying kaler, cibeunying kidul, dan cibiru jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya sekitar 76,03% sampai 84,43% dengan rincian di kecamatan cibeunying kaler yang menggunakan

hak pilihnya sekitar 78,86%, cibeunying kidul 80,54% dan dikecamatan cibiru sekitar 84,43% yang mengguanakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018.

Tabel 4.6
Hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2018 berdasarkan formulir Model DA1-KWK di kecamatan Cicadadap, cinambo, Coblong, gedebage, Kiaracobdong, Lengkong dan Mandalajati

A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		CIDADAP	CINAMBO	COBLONG	GEDEBAGE	KIARACONDONG	LENGKONG	MANDALAJATI
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26
A.	DATA PEMILIH								
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	18,913	7,710	40,310	12,761	42,748	22,554	23,508
		PR	18,997	8,030	40,524	13,018	43,881	24,132	23,523
		JML	37,910	15,740	80,834	25,779	86,629	46,686	47,031
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	11	40	122	44	105	137	21
		PR	15	25	92	45	71	126	16
		JML	26	65	214	89	176	263	37
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	216	142	1,219	302	947	785	285
		PR	240	158	1,343	361	1,061	827	311
		JML	456	300	2,562	663	2,008	1,612	596
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	19,140	7,892	41,651	13,107	43,800	23,476	23,814
		PR	19,252	8,213	41,959	13,424	45,013	25,085	23,850
		JML	38,392	16,105	83,610	26,531	88,813	48,561	47,664
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	13,553	6,022	27,565	9,702	32,262	16,564	18,302
		PR	14,426	6,669	30,116	10,614	35,255	18,562	19,620
		JML	27,979	12,691	57,681	20,316	67,517	35,126	37,922
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	9	37	116	44	103	111	20
		PR	13	25	84	43	69	113	16
		JML	22	62	200	87	172	224	36
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	199	141	1,001	299	874	745	285
		PR	217	158	1,126	357	989	786	311
		JML	416	299	2,127	656	1,863	1,531	596
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	13,761	6,200	28,682	10,045	33,239	17,420	18,607
		PR	14,656	6,852	31,326	11,014	36,313	19,461	19,947
		JML	28,417	13,052	60,008	21,059	69,552	36,881	38,554
C	TINGKAT PARTISIPASI	LK	71.90%	78.56%	68.86%	76.64%	75.89%	74.20%	78.13%
		PR	76.13%	83.43%	74.66%	82.05%	80.67%	77.58%	83.64%
		JML	74.02%	81.04%	71.77%	79.38%	78.31%	75.95%	80.89%

Sumber: (KPU Kota Bandung tahun 2018)

Berdasarkan tabel diatas tingkat partisipasi pemilih di 7 kecamatan yaitu kecamatan Cicadadap, cinambo, Coblong, gedebage, Kiaracobdong, Lengkong dan Mandalajati cukup tinggi yaitu berkisar antara 71,77% sampai 81,04%, tingkat partisipasi tertinggi berada di kecamatan cinambo yaitu sekira 81,04%.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pemilih perempuan lebih banyak yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan pemilih laki-laki.

Adapun rinciannya sebagai berikut, di kecamatan cidadap partisipasi pemilih laki-laki sekitar 71,90% yang menggunakan hak pilihnya, dikecamatan cinambo 78,56% pemilik hak suara yang menggunakan hak pilihnya, dikecamatan coblong 68,86% pemilik hak suara laki-laki yang menggunakan hak pilihnya, dikecamatan gedebage pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya sekitar 76,64% yang menggunakan hak pilihnya di kecamatan kiaracondong pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya sekitar 75,89% dan di kecamatan Lengkong dan Mandalajati yang menggunakan hak pilihnya sekitar 74,20% di kecamatan lengkong dan 78,13% pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya berkisar antara 74,66% sampai 83,64% dengan rincian keseluruhan pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya di 7 kecamatan tersebut sekitar 139.569 pemilik hak suara yaitu sekitar 79,73% yang menggunakan hak pilihnya sedangkan sisanya tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018. Dari data yang telampir diatas menunjukan bahwa pemilih perempuan lebih mendominasi pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018 ini, ini menunjukan bahwa kepedulian pemilih perempuan terlihat sangat jelas khususnya pada masa depan kota Bandung kedepannya, yaitu dengan memilih pemimpin kota Bandung untuk 5 tahun mendatang yakni 2018-2023.

Tabel 4.7
Hasil Pemilihan Wali Kota Bandung 2018 berdasarkan formulir Model DA1-KWK di kecamatan Panyileukan, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumur Bandung, dan Ujung Berung

A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		PANYILEUKAN	RANCASARI	REGOL	SUKAJADI	SUKASARI	SUMUR BANDUNG	UJUNG BERUNG
1	2	3	27	28	29	30	31	32	33
A.	DATA PEMILIH								
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	13,011	26,182	28,007	34,019	25,722	11,990	27,145
		PR	13,180	27,150	28,637	34,180	26,371	12,890	27,469
		JML	26,191	53,332	56,644	68,199	52,093	24,880	54,614
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	31	42	7	45	36	73	34
		PR	24	37	15	66	60	34	50
		JML	55	79	22	111	96	107	84
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/ Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	318	1,048	654	808	747	239	547
		PR	323	1,177	710	878	939	335	618
		JML	641	2,225	1,364	1,686	1,686	574	1,165
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	13,360	27,272	28,668	34,872	26,505	12,302	27,726
		PR	13,527	28,364	29,362	35,124	27,370	13,259	28,137
		JML	26,887	55,636	58,030	69,996	53,875	25,561	55,863
B	PENGGUNA HAK PILIH								
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	10,257	19,655	20,219	25,011	18,090	8,176	21,273
		PR	10,904	21,753	21,893	27,054	20,095	9,340	22,831
		JML	21,161	41,408	42,112	52,065	38,185	17,516	44,104
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	31	42	2	39	25	55	34
		PR	23	36	9	61	39	28	50
		JML	54	78	11	100	64	83	84
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/ Surat Keterangan	LK	311	898	652	672	703	230	547
		PR	321	1,032	709	721	897	329	618
		JML	632	1,930	1,361	1,393	1,600	559	1,165
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	10,599	20,595	20,873	25,722	18,818	8,461	21,854
		PR	11,248	22,821	22,611	27,836	21,031	9,697	23,499
		JML	21,847	43,416	43,484	53,558	39,849	18,158	45,353
C	TINGKAT PARTISIPASI	LK	79.33%	75.52%	72.81%	73.76%	71.00%	68.78%	78.82%
		PR	83.15%	80.46%	77.01%	79.25%	76.84%	73.14%	83.52%
		JML	81.25%	78.04%	74.93%	76.52%	73.97%	71.04%	81.19%

Sumber: (KPU Kota Bandung 2018)

Pada tabel diatas menunjukan bahwa dominasi pemilih perempuan di 7 kecamatan 7 kecamatan tersebut masih tinggi yaitu 79,05% dari 175.143 pemilik hak suara yang terdaftar, sedangkan sisanya yaitu 20,95% tidak menggunakan hak pilihnya, pada tabel diatas menunjukan pula bahwa pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya sekitar 74,28% dari 170.705 pemilih keseluruhan yang terdaftar pada 7 kecamatan tersebut.

Dibawah ini adalah rincian hasil perolehan suara berdasarkan pasangan calon wali Kota Bandung Tahun 2018:

1. Nurul Arifin dan Chairul Yaqin Hidayat: 301.418 suara (23,8%)
2. Yossi Irianto dan Aries Supriatna: 330.730 suara (26,1%)
3. Oded Muhammad Danial dan Yana Mulyana: 634.682 suara (50,1%)

Suara Sah : 1.266.830 (97,0%)

Suara Tidak Sah : 39.042 (3,0%)

Partisipasi Pemilih	1.305.872	78,7%
Daftar Pemilih Tetap	1.659.017	100,00%

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kesadaran Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Wali Kota Bandung

4.2.1.1 Kesadaran hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara

Berdasarkan hasil wawancara peniliti kepada divisi teknik pemilu, sosialisasi dan humas beliau menyampaikan bahwa:

> Kesadaran hak dan kewajiban pemilih pemula sebagai warga negara pada pemilihan wali Kota Bandung tahun 2018 terlihat cukup bagus hal ini dibuktikan dengan adanya pemilih pemula ikut serta dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh komunitas anak muda seperti contoh komunitas motor, beliau menyampaikan bahwa pihak KPU tidak pernah melakukan kerja sama namun mereka berinisiatip sendiri, selain dari hal tersebut tahun ini juga sudah ada peningkatan partisipasi pemilih dikota Bandung. (selasa, 24 Juli 2018)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa menurut divisi teknik pemilu, sosilisasi dan hupmas kesadaran hak dan kewajiban pemilih pemula di kota Bandung terlihat sudah bagus buktinya pada sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan kota Bandung pemilih pemula sangat antusias sekali dalam

mengikutinya, padahal kesdaran hak dan kewajiban pemilih pemula itu bukan dilihat dari antusiasnya mereka dalam mengikuti sosialisasi tapi dari kesadaran mereka dalam menjalankan kehidupan barbangsa dan bernegara yaitu dengan belajar dan mengembangkan kemampuan mereka dan minat serta bakat yang dimiliki.

Jika dilihat dari pernyataan tersebut pemilih pemula di kota Bandung menurut divisi teknis pemilu, sosialisasi dan Hupmas sudah memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya sebagai masyarakat kota Bandung yaitu dengan adanya antusias pemilih pemula pada saat komisi pemilihan umum kota Bandung khusunya divisi Teknis Pemilu, sosialisasi dan Hupmas melakukan sosialisasi.

Sementara itu pada wawancara peneliti kepada divisi program data dan pelaporan beliau mengatakan bahwa:

> Berdasarkan data yang mereka terima bahwa kesadaran hak dan kewajiban pemilih pemula saat ini sudah terlihat hal ini berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, hal ini terlihat dari antusias pemilih pemula dalam mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kota Bandung di beberapa Sekolah terkait dengan pemilihan wali Kota Bandung dan disaat pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung pemilih pemula ada yang menjadi panitia dalam pencoblosan. (selasa, 24 Juli 2018)

Pernyataan divisi program data dan pelaporan ini menunjukan bahwa kesadaran hak dan kewajiban pemilih pemula di kota Bandung sudah mulai terlihat dari adanya pemilih pemula yang menjadi panitia dalam pencoblosan yaitu menjadi penitia di Tempat pemungutan suara diwilayah tempat tinggalnya, dari pernyataan tersebut pula dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung tepatnya saat pencoblosan kesadaran hak dan

kewajiban pemilih pemula sudah terlihat menutut divisi program data dan pelaporan.

Namun berdasarkan wawancara peneliti kepada pemilih pemula di beberapa sekolah yang ada di kota Bandung, peneliti mendapati bahwa pemilih pemula dikota Bandung ada beberapa yang belum menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara namun adapula mereka yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara namun masih belum paham walaupun sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU akan hak dan kewajiban mereka khususnya dalam hal pemilihan wali kota Bandung, meraka yang belum paham akan hak dan kewajiban tersebut adalah mereka yang tidak mendapatkan sosialisasi sedangkan mereka yang paham adalah mereka yang sudah mendapatkan sosialisasi dari Komisi pemilihan Umum.

Kesadaran hak dan kewajiban pemilih pemula sebagai warga negara ini sangatlah penting dalam mewujudkan tingkat partisipasi pemilih pemula, karena jika mereka tidak sadar akan hak dan kewajibannya mereka tidak peduli terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung, hal ini terbukti ada beberapa pemilih pemula yang hanya asal pilih dalam pemilihan wali kota bandung, mereka mengatakan bahwa mereka hanya dipaksa memilih agar tidak dibilang Golput kemudian ada pula mereka yang tidak mau memberikan hak suara karena memang benar-benar belum sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. maka dapat disimpulkan bahwa masih ada pemilih pemula dikota Bandung belum sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, khususnya pada pemilihan wali kota bandung.

Kesadaran hak dan kewajiban ini sudah seharusnya diperbaiki karena hal ini menurut peneliti bisa mempengaruhi terhadap kemajuan bangsa, kesadaran para pemuda sebagai warga negara sangat diharapkan hal ini berkaitan dengan adanya kaitan terhadap generasi penerus, karena jika generasi penerus tidak sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara bisa saja hal negatif seperti korupsi dan kejahatan lainnya bisa terjadi di negeri ini khususnya kota Bandung dan umumnya Indonesia.

Sebagai generasi penerus tentunya kesadaran hak dan kewajiban para pemilih pemula sebagai warga negara ini merupakan hal yang wajib untuk ditingkatkan, karena selain menyangkut peran mereka sebagai warga negara hal ini juga mempengaruhi hal lain yang harus dikembangkan oleh generasi penerus yaitu terkait kesadaran mereka sebagai seorang yang memiliki hak suara dalam setiap pelaksanaan pemilihan umun dan hak mereka sebagai penentu nasib Kota Bandung kedepannya.

4.2.1.2 Kesadaran Hak Politik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada divisi program data dan pelaporan, beliau menyampaikan bahwa:

> Saat ini pemilih pemula dikota Bandung sudah mulai sadar akan hak politiknya, beliau menyampaikan hal tersebut karena berdasarkan hasil perolehan suara terlihat adanya peningkatan jumlah partisipasi pemilih, dimana saat pemilihan wali kota Bandung jumlah pemilih pemula juga meningkat, beliau menyampaikan bahwa pada saat pencoblosan pemilih pemula ada yang menjadi panitia dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. (selasa, 24 Juli 2018)

Pernyataan diatas memberikan kejelasan bahwa pemilih pemula dikota Bandung sudah sadar akan hak politiknya hal itu dibuktikan dengan adanya pemilih pemula menjadi panitia pada pemilihan wali kota Bandung yaitu menjadi panitia di Tempat Pemungutan Suara tempat pemilih pemula berada, dari pernyataan tersebut menurut peneliti kesadaran hak politik itu bukan dilihat dengan adanya pemilih pemula yang menjadi panitia saja tapi juga dilihat dari kesadaran pemilih dalam memberikan pendapat dan kritikannya kepada program kerja yang dicanangkan oleh para calon wali kota Bandung.

Sementara itu saat peneliti mewawancarai divisi teknis pemilu, sosialisasi dan humas beliau menyampaikan bahwa:

> Kesadaran politik seorang pemilih pemula bukan dilihat dari ikut serta dalam pencoblosan namun dilihat dari bagaimana mereka mengikuti pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung, beliau mengatakan bahwa pemilih pemula di kota bandung sudah terlihat sadar akan hak politiknya hal ini terbukti dengan adanya pemilih pemula ikut serta melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung 2018. (selasa, 24 Juli 2018)

Kesadaran hak politik pemilih pemula ini seharusnya bisa meningkat jika dilihat dari keikutsertaan pemilih pemula saat sosialisasi terkait pemilihan wali kota Bandung yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum kota Bandung melakukan sosialisasi khusunya kepada pemilih pemula dan masyarakat yang adadi kota Bandung, namun menurut peneliti yang menentukan kesadaran politik bukan dilihat dari adanya pemilih pemula yang ikut serta dalam sosialisasi namun dilihat dari adanya pemilih pemula yang aktif dalam memberikan pendapat untuk kemajuan bangsa khususnya kota Bandung.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti kebeberapa pemilih pemula rata-rata mereka mengerti hal-hal yang berkaitan dengan politik dan rata-rata jawaban dari pemilih pemula mereka tidak mau dibilang golput, karena selama ini mereka melihat bahwa pembangunan kedepan ditentukan oleh pemimpin yang akan dipilih, namun ada juga pemilih pemula yang tidak tahu sama sekali dengan politik bahkan tidak mengerti sama sekali bahkan mereka menjawab bahwa mereka tidak peduli sama sekali terhadap pemerintahan, hal ini karena mereka tidak tahu sama sekali akan jalan politik dan pemerintahan di kota Bandung.

Kesadaran hak politik menurut peneliti sangatlah penting karena hal ini menyangkut masa depan bangsa, dimana pemilih pemula merupakan generasi penerus bangsa yang akan menggantikan kaum tua dimasa yang akan datang, jika mereka acuh tak acuh terhadap hak politiknya bisa saja mereka sangat mudah dipengaruhi oleh pihak tetentu yang hanya mengambil keuntungan semata tapi tidak melakukan pembangunan Bangsa.

Kesadaran politik ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat sensitif jika tidak dimanfaatkan, apalagi mereka khususnya pemilih pemula harus benar-benar menyadari akan pentingnya politik untuk kehidupan mereka, karena segala kehidupan khususnya di Indonesia sangat erat sekali kaitannya dengan politik. Jika saja pengetahuan mereka buruk terhadap politik maka hal ini bisa aja membuat mereka malas untuk berpartisipasi padapemilihan umum, untuk itulah untuk menyadarkan mereka terhadap politik semua pihak seharusnya memberikan contoh teladan yang baik agar mereka sadar bahwa politik penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran terhadap politik juga haruslah ditopang dengan memberikan penjelasan kepada mereka khususnya para pemilih pemula ini agar mereka sadar akan peran dan fungsinya terhadap perkembangan politik di kota Bandung. Kesadaran mereka ini selain untuk membuat mereka merasa sadarakan perannya bagi kemajuan negara juga untuk mewujudkan tingkat partisipasi mereka pada perpolitikan baik itu sebagai yang dipilih atau sebagai pemilih. Karena jika tidak ada mereka siapa lagi yang akan jadi penerus bagi generasi tua di kota bandung.

Dalam menyadarkan para pemilih pemula ini terhadap politik dibutuhkan hal yang positif yaitu pendidikan politik hal ini agar mereka sadar terhadap politik, jika tanpa pendidikan politik mereka hanya acuh tak acuh terhadap kebijakan dan pelaksaan pemerintahan karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap politik ini. Pendidikan politik ini seharusnya menjadi pekerjaan bagi partai politik maupun bagi komisi pemilihan umum selain itu peran dan fungsi pemerintahan pun harus ada terhadap pendidikan politik bagi kaum muda khususnya pemilih pemula di kota Bandung.

4.2.2 Apresiasi Pemilih Pemula terhadap Pemerintah

4.2.2.1 Apresiasi Pemilih Pemula pada kinerja pemerintah

Apresiasi pemilih pemula terhadap kinerja pemerintah menurut divisi data dan pelaporan beliau menyampaikan bahwa:

> Saat ini tingkat apresiasi pemilih pemula pada pemerintah dapat dilihat dengan adanya pemilih pemula yang peduli terhadap pemilihan wali kota bandung, karena jika mereka tidak peduli pada kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bandung maka secara otomatis mereka tidak akan mengikuti pelasksanaan pemilihan wali Kota Bandung mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan pencoblosan namun jika mereka tidak peduli terhadap

> pelaksanaan kinerja pemerintah mereka akan acuh tak acuh pada pelaksanaan pemilihan wali kota bandung. (Selasa, 24 Juli 2018)

Pada pernyataan diatas disebutkan bahwa kepedulian pemilih pemula pada pemilihan wali kota Bandung termasuk salah satu apresiasi mereka terhadap pemerintah, padahal menurut peneliti hal itu justru keliru karena tidak bisa hal itu menentukan apresiasi mereka terhadap pemerintah karena apresiasi terhadap pemerintah seharusnya dilihat dengan adanya kepedulian mereka terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan adanya kepedulian mereka untuk menjaga seagala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan kemudian mengingatkan kepada masyarakat sekitar agar menjaga dan merawat segala kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu divisi teknis pemilu sosialisasi dan humas mengatakan bahwa:

> Untuk menilai apresiasi pemilih pemula pada kinerja pemerintah dapat dilihat dengan adanya pemilih pemula yang peduli terhadap pelaksanaan pemilihan wali Kota Bandung, hal ini terlihat sekali pada saat melaksanakan sosialisasi antusias pemilih pemula terlihat aktif bahkan kata beliau ada beberapa pemilih pemula yang menjadi panitia penyelenggraan pemungutan suara di TPS wilayahnya dan ada juga pemilih pemula yang secara suka dan rela dalam melaksanakan sosialisasi melalui Organisasi yang mereka ikuti di domisilinya terkait pemilihan wali kota Bandung. (Selasa, 24 Juli 2018)

Pernyataan diatas jelas menunjukan bahwa kepedulian pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung dapat dikatakan sebagai bentuk apresiasi mereka kepada pemerintah kota Bandung, padahal menurut peneliti hal itu justru tidak ada hubungannya dengan apresiasi mereka khususnya pemilih pemula kepada pemerintah karena bentuk apresiasi itu tidak bisa diukur

dengan adanya peran mereka khususnya pemilih pemula yakni dengan menjadi panitia saja namun dilihat dengan adanya kepedulian mereka dalam menjaga dan merawat pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemilih pemula di Kota Bandung, ada beberapa pemilih pemula di Kota Bandung mengapresiasi kinerja pemerintah kota Bandung dan sadar akan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bandung terutama yang mereka katakan kepada peneliti saat itu adalah apresiasi terhadap bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung. Beberapa pemilih pemula mengatakan bahwa jalannya pemerintahan dikota bandung sudah cukup baik, namun ada pula pemilih pemula yang tidak peduli sama sekali terhadap jalannya pemerintahan dikota bandung hal ini dikarenakan mereka sibuk dengan tugas yang ada disekolah dan juga terlalu sering dirumah.

Berdasarkan hal diatas maka dapat dilihat bahwa pemilih pemula di kota Bandung masih ada yang belum peduli atau acuh tak acuh terhadap kinerja pemerintah kota Bandung hal ini terjadi karena mereka tidak peduli terhadap hal apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung, meskipun mereka mengikuti pencoblosan namun mereka tidak mengetahui akan visi dan misi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah kedepannya.

Sikap pemilih pemula terhadap pemerintah khususnya kota bandung tidak peduli dan acuh tak acuh disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap hal yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung, ini terjadi karena mereka sibuk dengan sekolah maupun tugas sekolah, dan bisa juga disebabkan karena saat ini

mereka masih remaja dan dalam proses belajar. Walaunpun ada beberapa pemilih pemula yang mengapresiasi terhadap pemerintah kota bandung namun hal itu tidak sebanding dengan mereka yang hanya menikmati saja tanpa menapresiasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung.

Bagi pemilih pemula yang mengapresiasi kinerja pemerintah kota Banung mereka hanya tahu tentang pembangunan fisik saja namun tidak mengetahui pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung hal ini terlihat saat wawancara bahwa mereka hanya menyebutkan bahwa pembangunan di kota Bandung sudah bagus padahal jika dilihat secara mendalam pembangunan di kota Bandung belum sepenuhnya baik karena masih ada yang belum selesai, mereka khususnya pemilih pemula ini hanya mengapresiasi pembangunan torotoar bagi pejalan kaki dan pembangunan taman.

Apresiasi kepada pemerintah ini menjadi hal yang tidak terpisahkan terhadap kepedulian pemilih pemula dalam menjaga segala pembangunan yang dilaksanakan dan hal ini juga seharusnya menyadarkan mereka terhap pentingnya mereka dalam kemajuan kota Bandung, apresiasi kepada pemerintah ini juga seharusnya bisa meningkatkan kesadaran mereka pada pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan wali kota Bandung karena mereka sebagai generasi penerus dalam pembangunan dan kemajuan kota Bandung kedepannya.

Pemerintah kota Bandung seharusnya memberikan penjelasan kepada mereka khususnya generasi muda ini agar mereka tahu bahwa pemerintah kota bandung melaksanakan pembangunan dan kebijakan lainnya, hal ini agar mereka sadar bahwa pembangunan dan kinerja pemerintah kota bandung itu bukan hanya

fisik saja tapi masih ada hal lain yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung. Hal ini harus dilakukan karena untuk saat ini mereka khususnya pemilih pemula tidak mengetahui hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah, padahal mereka juga merupakan warga kota Bandung.

Kesadaran pemilih pemula terhadap pembanguan dan kinerja pemerintah kota Bandung menurut peneliti bisa meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pemerintahan yang lebih baik untuk kedepannya sehingga hal ini menjadikan mereka aktif terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung baik sebagai pemilih maupun sebagai panitia, hal ini juga bisa menjadikan mereka berfikir dalam menentukan pilihannya khususnya calon wali Kota Bandung yang berkualitas dari segi Visi dan Misi pembangunan Kota Bandung hal ini juga sebagai tindak lanjut agar mereka tidak terprovokasi terhadap politik uang.

4.2.2.2 Penilaian Pemilih Pemula Terhadap Kebijakan Pemerintah kota Bandung

Dalam hal penilaian terhadap kebijakan pemerintah menurut divisi program data dan pelaporan bahwa:

> Pemilih pemula rata-rata masih dalam tahap proses karena tidak benar-benar merasakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota bandung, karena hal yang menyangkut kebijakan biasanya akan dirasakan oleh orang dewasa yang sudah bekerja, sementara mereka hanya mengikuti pendidikan disekolah sesuai jadwal, dampak yang mereka rasakan belum berpengaruh terhadap kehidupan mereka karena mereka masih ditanggung oleh orang tua dalam kehidupannya. (selasa, 24 Juli 2018)

Penilaian pemilih pemula saat ini masih belum terlihat karena mereka masih belum mersakan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya

kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang menyangkut ksesjahteraan masyarakat sehingga mereka khususnya pemilih pemula hanya bisa merasakan aman-aman saja dalam kehidupannya, menurutpernyataan diatas bahwa pemilih pemula saat ini tidak begitu merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung hal ini tentu saja berbeda dengan orang tua mereka maupun masyarakat kota Bandung yang merasakan langsung dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga bisa melakukan penilaian kepada pemerintah kota Bandung.

Sementara itu divisi teknis pemilu, sosialisasi dan humas menyampaikan bahwa:

> Dalam penilian kebijakan yang dilaksanakan oleh perintah kota Bandung pemilih pemula masih belum sepenuhnya bisa menilai karena mereka belum benar-benar merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung, hal ini dimaklumi karena mereka dikategorikan anak yang baru beranjak dewasa sehingga sangat minim terkena dampak terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung. (selasa, 24 Juli 2018)

Dari pernyataan tersebut pemilih pemula di kota Bandung masih belum bisa mamberikan penilaian terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung hal ini terjadi karena mereka khususnya pemilih pemula di kota Bandung tidak merasakan langsung dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung, mereka hanya merasakan dampak pembangunan saja tapi tidak merasakan dampak lain sehingga penilaian mereka kepada pemerintah kota Bandung hanyaterkait pembangunan saja.

Hasil wawancara peneliti dengan pemilih pemula di beberapa sekolah ada sebagian pemilih pemula yang mengatakan bahwa menurut mereka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota bandung sudah cukup baik terutama dalam hal

pembanagunan torotoar, namun untuk kebijakan lainnya mereka tidak mengetahuinya hal ini dikarenakan mereka sibuk dengan tugas sekolah. Namun ada pula pemilih pemula yang tidak peduli sama sekali pada kebijakan pemerintah, mereka hanya menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung.

Berdasarkan hal diatas menurut peneliti pengetahuan akan kebijakan pemerintah kota bandung sangat penting karena dengan mengetahui segala kebijakan yang akan dibuat maka mereka akan mudah dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan kota Bandung, dengan adanya pengetahuan juga maka mereka akan mudah untuk menetukan pilihannya untuk lima tahun kedepan, jika mereka tidak mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh calon jika terpilih maka mereka akan kesulitan untuk menetukan pilihan yang paling baik.

Pengetahuan Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bandung sudah seharusnya diketahui oleh mereka khususnya pemilih pemula karena tanpa pengetahuan tentang kebijakan pemerintaha bisa saja mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah kota bandung seharusnya melakukan sosialisasi kepada para pemuda khususnya pemilih pemula dan anak sekolah agar mereka sadar dan tahu akan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandung.

Pentingnya pengetahuan pemilih pemula terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota bandung agar mereka bisa mengerti dan tahu akan kebijakan yang akan dilaksanakan dan hal ini juga agar mereka tahu bahwa mereka juga

harus berperan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan memeberikan masukan jika kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat kota bandung. Selain hal tersebut pengetahuan mereka terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bandung agar mereka bisa lebih teliti dalam menentukan pemimpin masa depan khususnya dalam pemilihan wali Kota Bandung.

Pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah ini penting agar mereka khususnya pemilih pemula bisa menilai kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung karena mereka juga merepakan warga kota Bandung, hal ini juga agar mereka sadar bahwa peran dan fungsi mereka sangat dibutuhkan dalam menentukan pemimpin kota Bandung demi meningkatkan partisipasi mereka pada pemilihan wali Kota Bandung serta meningkatkan ketelitian pemilih pemula dalam menentukan pilihannya.

Penilaian terhadap kebijakan pemerintah kota Bandung oleh pemilih pemula sangat minim bahkan tidak adabukan tanpa alasan hal ini terjadi karena minimnya penegetahuan mereka terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung, maka dari itu pemerintah kota Bandung harus benar-benar melakukan sosialisasi yang merata kepada seluruh elemen masyarakat, selain itu aparat dan masyarakat pun harus ikut serta memberiakn penjelasan kepada mereka agar mereka mengetahui hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Bandung, karena mereka juga merupakan warga dan nantinya akan menjadi generasi yang meneruskan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mereka pun sewaktu-waktu akan menjadi pengganti pemerintahan kota Bandung berikutnya.

4.2.3 Status Sosial dan Ekonomi Pemilih Pemula di Kota Bandung

4.2.3.1 Status Ekonomi Pemilih Pemula di Kota Bandung

Status ekonomi pemilih pemula menurut devisi program data dan pelaporan sebagai berikut:

> "Status ekonomi ini ada beberapa macam, ada yang dikategorikan orang kaya, sederhana dan kurang mampu, dari segi ekonomi itu menurut divisi program data dan pelaporan bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula, ada orang yang kaya namun acuh tak acuh pada pelasanaan pemilihan wali kota bandung, namun ada pula yang peduli, sementara itu orang yang sederhana juga ada yang seperti itu, namun orang yang kurang mampu mereka bisa saja antusias dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan wali kota bandung karena mereka tidak terbebani dengan kegiatan lain selain dari sekolahnya. (selasa, 24 Juli 2018)"

Status ekonomi pemilih pemula di kota Bandung untuk saat ini terdiri dari beberapa macam yaitu ada yang kaya sederhana dan dari keluarga kurang mampu, hal ini tentu saja ada kaitannya dengan partisipasi pemilih pemula di kota Bandung, salah satunya dari status ekonomi mereka pemilih pemula yang dikategorikan kurang mampu bisa saja menjadi tinggi tingkat partisipasinya hal ini terjadi karena mereka akan terpengaruh dengan isu kesejahteraan yang dibuat oleh pasangan calon wali kota Bandung, sedangkan mereka yang berasal dari keluarga kaya tidak mudah terpengaruh dengan hal yang demikian.

Sementara itu divisi teknis pemilu, sosialisasi dan humas mengatakan bahwa:

> Status ekonomi pemilih pemula ada berbagai macam, namun hal tersebut menjadi masalah jika status ekonomi dari keluarga mampu tapi tidak bersosialisasi namun biasanya mereka dari ekonomi mampu mengikuti les atau kegiatan diluar sekolah, sehingga mereka adasebagian tahu dengan pelaksanaan pemiliahn wali kota Bandung namun ada pula yang tidak peduli sama sekali walaupun sudah mendapatkan sosialisasi. Namun bagi

> mereka yang berstatus keluarga sederhana bisa juga terjadi demikian namun bisa saja justru sebaliknya karena status ekonomi tidak serta merta menjamin akan kepedulian mereka terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung. (selasa, 24 Juli 2018)

Status ekonomi ini bisa membuat orang berpartisipasi pada pemilihan wali kota Bandung hal ini memberikan suatu kepedulian mereka untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018, namun status ekonomi ini tidak bisa menjadi jaminan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula karena setiap pemilih pemula memiliki pemikiran dan kesibukan masing-masing bisa saja mereka yang berasal dari keluarga kaya sibuk dengan teknologi namun masih bisa berpartisipasi pada pemilihan wali kota Bandung namun bisa saja sebaliknya hal ini tergantung dari kepedulian mereka pada kemajuan kota Bandung kedepannya.

Saat melakukan wawancara dengan pemilih pemula dikota bandung pemilih pemula yang berasal dari keluarga mempu mengatakan bahwa mereka ikut serta dalampemilihan wali kota bandung karena tidak mau dibilang golput sementara itu ada pula mereka yang benar-benar tulus mengikuti pelaksanaan pemilihan wali kota bandung karena adanya kesadaran bahwa mereka harus ikut serta dalam pemilihan wali kota Bandung.namun bagi mereka yang ekonominya sederhana mengetakan bahwa mereka memilih salah satu kandidat berdasarkan penegetahuan mereka pada spanduk yang ada di jalan.

Dari bahasan diatas menurut peneliti bahwa semakin kaya ekonomi pemilih pemula seharusnya semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya karena rata-rata mereka yang kaya memiliki banyak informasi terutama melalui teknologi android yang mereka gunakan, berbeda dengan mereka dengan ekonomi sederhana dan

kurang mampu karena ada sebagian mereka tidak menggunakan teknologi android yang canggih, sehingga mereka mendapatkan informasi hanya dari spanduk saja itupun jika ada.

Status ekonomi ini memang menjadi hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum karena bisa menentukan pilihan yang akan dilakukan oleh para pemilih pemula hal ini bisa mempengaruhi karena adanya politik uang, mereka khususnya yang ekonominya rendah bisa terpengaruh terhadap politik uang tersebut sehingga bisa saja asal pilih tergantung yang memberikan uang, namun hal ini bisa di barengi dengan membeikan pencerahan kepada mereka agar tidak mudah dipengaruhi oleh politik uang.

Status ekonomi ini juga bisa meningkatkan kesadaran mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan wali kota bandung hal ini dengan caramemberikan penjelasan kepada mereka tentang pentingnya pemilihan wali Kota Bandung untuk kesejahteraan karena pada pemilihan wali kota Bandung tentu saja ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat khususnya adanya kebijakan ekonomi kedepannya yang menjadi visi dan misi para calon wali kota Bandung.

4.2.3.2 Status Pendidikan Pemilih Pemula di Kota Bandung

Dalam hal status pendidikan menurut divisi data dan pelaporan pemilih pemula terdiri dari:

> Mereka yang berpendidikan tinggi khususnya mereka yang berasal dari purnawirawan TNI-POLRI, sementara itu mereka yang berasal dari pemilih pemula belum 17 Tahun tapi sudah menikah rata-rata mereka berpendidikan terakhir Sekolah menengah Pertama namun ada juga lebih tinggi dari itu, smentara itu mereka yang berasal dari pemilih pemula dalam proses

> pendidikan adalah mereka yang masih sekolah namun sudah 17 Tahun. (selasa, 24 Juli 2018)

Pernyataan diatas mengungkapkan bahwa pemilih pemula di kota Bandung terdiri dari bebagai kategori mulai dari purnawirawan TNI-POLRI dan mereka yang sudah menikah serta mereka yang masih duduk dibangku sekolah, mereka yang sudah menikah ini ada yang belum 17 tahun namun sudah memiliki hak pilih pendidikan mereka pun adayang lulusan Sekolah menengah pertama, sedangkan mereka yang di kategorikan pemilih pemula yang dalam proses pendidikan adalah mereka yang masih sekolah yaitu anak SMA yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP)

Sementara itu divisi taknis pemilu dan sosialisasi mengatakan bahwa:

> Pemilih pemula dalam proses pendidikan adalah mereka yang baru berumur 17 tahun namun dalam proses belajar, mereka ini sangat rentan sekali golput dalam pelaksanaan pemilihan wali kota bandung maka untuk itu komisi pemilihan umum kota Bandung melakukan sosialisasi kebeberapa sekolah, hal ini untuk mendongkrak tingkat partisipasi mereka, menurut divisi teknis pemilu dan sosialisasi partisipasi pemilih pemula ini terlihat dari antusiasnya mereka mengikuti sosialisasi dari situ bisa dinilai bahwa partisipasi mereka sudah kelihatan. (selasa, 24 Juli 2018)

Status pendidikan pemilih pemula untuk saat ini menunjukan mereka dalam status proses pendidikan yaitu sebagai pelajar khususnya mereka yang duduk di bangku sekoalh menengah atas (SMA), status mereka ini menunjukan mereka saat ini sebagai pelajar yang memiliki hak pilih pada pemilihan wali kota Bandung tahun 2018.

Dalam wawancara peneliti pada pemilih pemula dibeberapa sekolah rata-rata mereka memang dalam proses pendidikan, dan mereka pun mengatakan bahwa dalam pendidikan mereka hanya bekajar saja kalau hal yang berkaitan

dengan politik pengetahuan mereka masih kurang apalagi untuk pelaksanaan pemilihan wali kota bandung mereka hanya mengetahuinya melalui spanduk, untuk sosialisasi mereka ada yang mengetahui namun ada pula yang tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali hal ini dikarekan sekolah mereka belum mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umun.

Dalam pelaksanaan sosialisasi seharusnya pihak penyelenggara melakukan sosialisasi secara merata khususnya pada mereka yang masih duduk di bangku sekolah, hal ini juga harus dilakukan dengan kerja sama agar KPU bisa mengoptimalkan waktu, karena jika dilakukan sendiri tanpa dukungan pihak lain menurut peneliti tidak efektif dan maksimal buktinya masih ada pemilih pemula yang tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali dari Komisi Pemilihan Umum kota Bandung.

Menurut peneliti seharusnya komisi pemilihan umum kota bandung melakukan sosialisasi dengan bekerja sama pada pihak lain dalam hal ini organisasi kepemudaan atau masyarakat hal ini adalah agar mereka mengetahui bahwa betapa pentingnya mengikuti pelaksanaan pemilihan wali Kota Bandung khususnya bagi pemilih pemula karena mereka merupakan generasi yang akan menjadi masa depan pembangunan kota Bandung kedepannya.

4.2.3.3 Status Pekerjaan Pemilih Pemula di Kota Bandung

Dalam hal pekerjaan menurut divisi pelaporan data sebagai berikut:

> Pemilih pemula rata-rata belum bekerja karena mereka masih sekolah jika pun ada mereka hanya membantu keluarga saja. Sementara itu divisi teknis pemilu, sosialisasi dan pelaporan data mengatakan pemilih pemula di kota bandung rata-rata mereka yang tidak bekerja sama sekali khususnya mereka

> yang masih sekolah sementara itu bagi mereka yg tidak sekolah rata-rata sudah bekerja. (selasa, 24 Juli 2018)

Pkerjaan pemilih pemula di kota Bandung khususnya mereka yang duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA) Menurut data yang dimiliki oleh divisi pelaporan dan data yaitu mereka bekerja sebagai pelajar, sebagai seorang pelajar berdasarkan status pekerjaan yang tercantum pada data kartu tanda penduduk yang mereka miliki. Dari pernyataan tersebut pemilih pemula di kota bandung khususnya mereka yang duduk dibangku sekolah menengah atas adalah sebagai seorang pelajar.

Sementara itu menurut divisi teknis Pemilu, sosialisasi dan Hupmas komisi pemilihan umum kota Bandung mengatakan:

> Untuk status pekerjaan pemilih pemula khususnya mereka yang baru berstatus sebagai pemilih terlihat rata-rata masih belum memiliki pekerjaan hal ini terjadi karena mereka rata-rata merupakan siswa dan anak didik yang sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan uang dan napkah. (selasa, 24 Juli 2018)

Status pemilih pemula menunjukan mereka saat ini rata-rata sebagai pelajar khususnya mereka yang duduk di bangku sekolah menengah atas, hal ini berdasarkan data bagi mereka yang duduk di bangku sekolah yaitu sebagai peserta didik, menurut peneliti hal ini bukan serta merta menunjukan mereka tidak bekerja walaupun berdasarkan data status mereka sebagai pelajar namun tidak menentukan mereka tidak bekerja karena pelajarjaman sekarang sudah diajarkan mandiri apalagi saat ini khususnya di kota Bandung ada pelajar yang sudah bekerja walaupun tidak tercatat pada data yang ada.

Sementara itu pada wawancara peneliti dengan pemilih pemula mereka rata-rata menjawab belum bekerja sama sekali halk ini dikarenakan mereka sibuk

dengan sekolah dan belajar, belum lagi mengerjakan tugas-tugas dari sekolah apalagi saat ini sekolah seolah memberatkan mereka karena pulangnya sore sehingga tidak ada waktu untuk bekerja. Dalam status pkerjaan menurut peneliti pemilih pemula yang belum bekerja ini sangatlah rentan terhadap hal-hal yang membuat mereka golput karena mereka sibuk dengan pekerjaan yang diberikan sekolahnya.

Menurut peneliti untuk saat ini memang pemilih pemula rata-rata tidak memiliki pekerjaan sama sekali hal ini karena mereka merupakan anak sekolah yangdiberikan tanggung jawab untuk belajar oleh orang tuanya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bisa saja mereka bekerja secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang tuanya, apalagi untuk saat ini anak muda di kota Bandung khususnya para remaja didik untuk mandiri.

Kemandirian seorang pemilih pemuka ini menurut peneliti tergantung dari didikan keluarga karena bisa aja pemilih pemula tidak mandiri jika didikan keluarganya kurang terhadap anaknya, kaitannya dengan status pekerjaan ini juga ditentukan oleh keluarga bisa saja pemilih pemula yang diajarkan mendiri oleh keluarganya bekerja demi masa depannya namun tidak meninggalkan segala tugas sekolahnya.

4.2.4 Apiliasi Politik Orang Tua Pemilih Pemula di Kota Bandung

Dalam politik lingkungan keluarga sangatlah penting sekali karena keluargalah gerbang utama dalam mensupport seseorang untuk mengikuti atau

mengetahui hal yang berkaitan dengan politik untuk itulah menurut peneliti keluarga sangatlah penting sekali untuk mempengaruhi seorang pemilih pemula.

4.2.4.1 Perhatian Orang Tua Pemilih Pemula Terhadap Politik pada Pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2018

Menurut devisi pelaporan dan data dalam hal kaitan orang tua pada pemilihan wali kota Bandung sebagai berikut:

> Perhatian orang tua dalam ranah politik kepada anaknya sangatlah penting sekali karena jika tidak demikian seorang pemilih pemula sulit sekali untuk ikut serta dan aktif dalam pelaksanaan pemilihan wali kota bandung. Dalam masalah ini orang tua harus memberikan pencerahan kepada anaknya untuk ikut serta dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung karena peran dan pengaruh orang tua sangat penting sekali terhadap anaknya terutama bagi anak yang jarang bergaul terhadap lingkungan sekitar. (selasa, 24 Juli 2018)

Perhatian orang tua sangatlah penting khususnya dalam masalah politik karena orang tua merupakan contoh bagi anaknya orang tua juga berfungsi sebagai pemberi pencerahan terkait politik dan juga orang tua sebagai kunci untuk memberikan penjelasan kepadaanaknya terkait pemilihan wali kota Bandung tahun 2018, menurut peneliti orang tua seharusnya sangat berperan untuk meningkatkan partisipasi anaknya dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung namun hendaknya tidak memaksa untuk memilih calon tertentu.

Sementara itu menurut divisi teknis pemilu, sosialisasi dan hupmas mengatakan bahwa:

> Perhatian keluarga yang kurang akan membuat seorang pemilih acuh tak acuh karena tidak ada pencerahan sama sekali dari keluarga untuk itu orang tua harus benar-benar melakukan diskusi kepada anaknya terkait pemilu khususnya dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung hal ini agar anak yang menjadi pemilih pemula bisa mengetahui tentang pelaksanaan

> pemilihan wali kota Bandung dan tatacara untuk mencoblos maupun memilih pemimpin yang berkualitas. (selasa, 24 Juli 2018)

Peran orang tua dalam pemilihan wali kota Bandung sangatlah diharapkan karena untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung karena tanpa adanya penjelasan dari orang tua bisa aja mereka hanya asal-asalan dalam melakukan pilihannya, sekain itu bisa juga menjadikan mereka tidak peduli terhadap pemilihan wali kota Bandung.

Dalam wawancara peneliti pada pemilih pemula rata-rata mereka mengatakan bahwa orang tua mereka tidak tidak pernah berdiskusi terkait pemilihan wali kota Bandung, namun orang tua mereka pada pelaksanaan pencoblosan mengajak untuk ikut serta dalam memilih calon yang akan dipilih nanti. Orang tua mereka tidak mendiskusikan kepada mereka dikarenakan orang tua mereka jarang di rumah, sementara itu ada juga pemilih pemula yang mengatakan bahwa keluarga mereka mendiskusikan tentang calon yang akan dipilih.

Menurut peneliti orang tua dalam hal pemilihan wali kota bandung sangatlah penting sekali untuk mendiskusikan tentang pemilihan wali kota bandung tapi bukan untuk berkampanye, karena dalam hal hak pilih terkadang sering disalah gunakan untuk memilih calon tertentu padahal mereka tidak mengetahui sama sekali tentang calon tersebut.

Pentingnya orang tua dalam menjelaskan kepada anaknya khususnya pemilih pemula ini harusnya menjadikan meningkatnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung karena mereka sangat rentan sekali

terhdap pengaruh dari luar khususnya gal-hal yang menjadikan mereka acuh tak acuh terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung, tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam kualitas demokrasi.

Perhatian orang tua terhadap politik seharusnya menjadikan orang tua pemilih pemula sadar bahwa mereka perlu memberikan penjelasan kepada anaknya agar bisa ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung karena tanpa orang tua tentu saja pengetahuan pemilih pemula tehadap politik menjadi semu namun tidak menutup kemungkinan bisa saja pemilih pemula ini belajar sendiri atau dengan temannya terkait politik.

Selain pengetahuan politik orang tua pula harus menjelaskan kepada anaknya agar tidak salah dalam menentukan pilihannya karena hak merekadalam ranah politik sangat penting untuk kepentingan masyarakat mereka juga harus ikut serta dalam menentukan pemimpin kota Bandung kedepannya, sehingga hal ini bisa meningkatkan partisasipasi mereka khususnya pemilih pemula pada pemilihan wali kota Bandung, namun orang tua bisa saja tidak begitu paham terhadap politik maka dari itu peran serta dukungan partai politik juga penting agar bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya kepada mereka yang masih minim pengetahuan terhadap politik.

Selain pendidikan politik terhadap orang tua partai politik juga harus memberikan penjelasan bahwa politik itu penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa politik hukum dan pembangunan di kota Bandung bisa saja tidak berjalan semestinya maka dari itu peran partai politik dan pihak Komisi Pemilihan Umum ini sangatlah penting untuk memberikan penjelasan

kepada orang tua pemilih pemula dan masyarakat pada umumnya agar paham dengan politik.

4.2.4.2 Pengetahuan Orang Tua Pemilih Pemula Terhadap Politik

Pengetahuan orang tua pemilih pemula terhadap politik menurut divisi tenknis pemilu, sosialisasi dan Hupmas sebagai berikut:

> Peran orang tua untuk saat ini sudah cukup baik karena menurut beliau ada keluarga yang sudah ikut berkali-kali dalam pelaksanaan pemilihan wali kota bandung hal ini tentu saja orang tua pemilih pemul ini bisa memberikan penjelasan kepada anaknya terkait politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung. (selasa, 24 Juli 2018)

Peraranan orang tua dalam politik sangat penting namun pengetahuan orang tua terhadap politik juga sangatlah penting karena sangatlah percuma jika orang tua tidak tahu sama sekali terhadap politik karena justru hal ini akan membuat anaknya sulit untuk diberikan pengetahuan politik oleh orang tuanya jika orang tuanya tidak paham sama sekali terhadap politik, untuk itu pengetahuan orang tua terhadap politik perlu ditingkatkan hal ini agar para orang tua bisa memberikan penjelasan kepada anaknya terkait politik dan pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung.

Sementara itu menurut divisi program data dan pelaporan, beliau mengatakan bahwa:

> Pengetahuan orang tua terhadap politik harus ada hal ini agar orang tua bisa menjelaskan kepada anaknya terkait politik dan pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung, karena yang bisa memeberikan penjelasan dan pengaruh kepada pemilih pemula ini adalah orang tua karena orang tua ini memberikan pengaruh cukup besar kepada anaknya dalam partisipasi politik. (selasa, 24 Juli 2018)

Orang tua sebagai orang yang berpengaruh bagi anak-anaknya terkait politik wajib memiliki pengetahuan politik dan wajib pula memberikan penjelasan agara anaknya bisa paham dan mengerti dengan politik hal ini pula harus dilakukan karena pengaruh orang tua terhadap anaknya cukup besar bahkan bisa sengat berpengaruh terhadap prilaku anaknya, untuk itu orang tua harus lebih paham dan mengerti dengan politik dan paham terhadap politik.

Dari hasil wawancara peneliti beberapa waktu lalu terhadap pemilih pemula dikota bandung peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata pemilih pemula mengatakan bahwa keluarga mereka mengarahkan mereka untuk memilih calon tertentu pada pemilihan wali kota Bandung terutama tokoh yang berlatar belakang Agama, namun ada pula pemilih pemula yang menjawab bahwa keluarga mereka tidak ada yang mengarahkan untuk memilih calon tertentu namun menjelaskan bahwa mereka harus ikut mencoblos pada pemilihan wali kota Bandung, namun ada satu orang pemilih pemula yang tidak diarahkan untuk memilih bahkan dilarang untuk peduli terhadap politik.

Pengetahuan keluarga terhadap politik seharusnya memeberikan pengaruh besar terhadap para pemilih pemula di kota bandung karena orang tua mempunyai peranan sangat penting untuk mempengaruhi anaknya khususnya para pemilih pemula, tanpa penjelasan dari orang tua pemilih pemula bisa saja menjadi acuh tak acuh pada perpolitikan yang ada khususnya pada pemilihan wali kota Bandung.

Namun hal ini harus didukung dengan meningkatkan pengetahuan orang tua pemilih pemula terhadap politik, karena bisa saja para pemilih pemula ini tidak

paham terhadap politik, untuk itu pihak penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum harus memberikan penjelasan kepada orang tua pemilih pemula agar paham dan mengerti terhdap politik khususnya pemilihan wali kota Bandung. Pihak partai politik juga seharusnya memberikan panjelasan terkait politik yaitu dengan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat kota Bandung hal ini demi meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap politik.

Selanjutnya peran serta organisasi masyarakatpun harus dilibatkan dalammeningkatkan pengetahuan masyarakat kota Bandung terhadap politik, maka dari itu pihak komisi Pemilihan Umum Kota Bandung harus menjalin keja sama terhadap organisasi dimasyarakat agar ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi terkait politik dan pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung hal ini agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terhadapa pemilihan wali kota Bandung.

4.2.5 Pengalaman Berorganisasi Pemilih Pemula di Kota Bandung Tahun 2018

4.2.5.1 Mengikuti Organisasi di sekolah dan lingkungan sekitar Pemilih Pemula di Kota Bandung

Menurut divisi pelaporan dan data mengenai pemilih pemula yang berorganisasi, adapun penjelasan beliau sebagai berikut:

> Pemilih pemula di kota Bandung ada yang mengikuti Organisasi ada pula yang mengikuti namun tidak serius sehingga mereka tidak benar-benar mengetahui cara berorganisasi yang baik dan hal ini juga bisa saja membuat mereka tidak tahu sama sekali informasi terkait pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung karena di Organisasi sering ada pembahasan terkait hal tersebut, terutama organisasi yang ada diluar sekolah. (selasa, 24 Juli 2018)

Pernyataan diatas menyebutkan bahwa pemilih pemula di kota bandung masih ada yang belum benar-benar aktif dalam berorganisasi hal ini disebabkan karena mereka belum mengerti tatacara berorganisasi yang baik dan benar sehingga mereka tidak paham berorganisasi yang sesungguhnya, padahal dari organisasilah mereka bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan pemilihan wali kota Bandung, namun yang terjadi mereka hanya bermain-main saja dalam berorganisasi.

Organisasi sebagai salah satu wadah untuk pengembangan karakter dan kepribadian seharusnya menjadi tempat para pemilih pemula untuk belajar dan mengetahui hal-hal yang selama ini belum mereka ketahui, namun walaupun demikian sebagus apapun visi dan misi sebuah organisasi jika tidak diikuti secara baik dan benar tentu saja tidak bermanfaat bagi mereka yang hanya bermain-main dalam berorganisasi.

Divisi Teknis Pemilu, sosialisasi dan Humas mengatakan bahwa:

> Pemilih pemula dikota Bandung banyak yang mengikuti Organisasi hal ini dikarenakan saat ini ekskul atau mengikuti organisasi itu wajib karena itu sebagai pengembangan karakter minat dan bakat murid sekolah, mengikuti ekskul juga akan diberikan nilai tambah dari sekolah, untuk keikutsertaan pemilih pemula pada organisasi pemuda masih terlihat kurang hal ini dikarenakan kesibukan mereka terhadap tugas sekolah, namun masih ada pemilih pemula yang mengikuti organisasi pemuda di lingkungannya, hal ini terbukti disaat ada organisasi komunitas motor melakukan sosialisasi disana ditemukan pemilih pemula yang ikut dalamkomunitas tersebut. (selasa, 24 Juli 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa saat ini pemilih pemula rata-rata mengikuti organisasi namun hal itu bukan karena keseriusan namun karena adanya kewajiban untuk mengikuti organisasi dari sekolahnya hal

ini sebagai pengembangan karakter, minat dan bakat mereka agar bisa mengembangkan kemampuan diri dan sebagai penilaian dari sekolah, menurut peneliti hal ini justru membuat mereka tidak maksimal dan terlihat memaksa padahal dalam berorganisasi tidak ada paksaan karena hal itu justru membuat mereka tidak serius dalam setiap berorganisasi.

Berdasarkan wawancara peneliti pemilih pemula mengatakan pengalamannya mengikuti organisasi disekolah hanya sebatas pengetahuan tentang organisasi tersebut saja yakni hal-hal yang terkait dengan program kerja maupun kegiatan saja namun tidak ada pembahasan terkait pemilihan wali kota Bandung. Sementara itu ada beberapa pemilih pemula yang memiliki pengalaman berorganisasi diluar sekolah yaitu di lingkungan tempat tinggalnya, mereka mengatakan di organisasi tersebut pernah membahas terkait pemilihan wali kota Bandung namun hanya sekedar pembahasan saja tapi tidak untuk memilih calon tertentu karena mereka dipercaya sebagai panitia dalam pelaksanaan pemilihan wali Kota Bandung.

Menurut peneliti keikutsertaan pemilih pemula pada organisasi masih kurang hal ini terlihat karena mereka mengikuti organisasi karena adanya kewajiban dari sekolah untuk mengikuti organisasi, sementara itu organisasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan karakter mereka sebagai anak Bangsa, selain kurangnya keikutsertaan mereka pada organisasi disekolah merekapun sangatlah kurang dalam mengikuti organisasi di luar sekolah seperti organisasi pemuda dan komunitas lainnya.

Keikutsertaan pemilih pemula dalam berorganisasi sudah sepantasnya bisa meningkatkan partisipasi mereka terhadap pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung karena organisasi bisa memberikan penjelasan akan peran serta fungsi mereka pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, namun itu khusus bagi mereka yang serius dalam berorganisasi. Khusus organisasi masyarakat biasanya memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung. Pengaruh organisasi bagi pemilih pemula ini selain bisa meningkatkan kepedulian mereka terhadap politik bisa juga membuat mereka tidak peduli terhadap politik khususnya pada pemilihan wali kota Bandung, karena di organisasi mereka akan diajarkan caraberpendapat dan menetukan pendapatnya.

4.2.5.2 Keaktifan Pemilih Pemula pada Kegiatan Organisasi

Menurut divisi pelaporan dan data keaktipan pemilih pemula pada kegiatan organisasi bisa dilihat seabagai berikut:

> Dengan adanya keikutsertaan mereka pada kegiatan yang diadakan baik itu sebagai peserta maupun sebagai panitia tertama pada organisasi ekskul disekolah, selain dari ekskul yang mereka ikuti juga dari kegiatan lain yang diadakan oleh sekolahnya. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka agar mau mengikuti kegiatan lain yang ada diluar sekolahnya, untuk pengaruh kegiatan organisasi sekolah ini bisa saja terbawa disaat mereka berada pada lingkungannya terutama adanya keikut sertaan mereka pada kegiatan di masyarakat dalam hal ini pelaksanaan pemilihan wali kota Bandung. (selasa, 24 Juli 2018)

Keikutsertaan pemilih pemula dalam kegiatan organisasi sudah semestinya memberikan pengaruh bagi mereka agar bisa dan aktif pula pada kegiatan yang adadi wilayah tempat mereka tinggal khususnya kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik yaitu hal yang terkait dengan pelaksanaan pemilihna

wali kota Bandung, karena pengaruh dalam mengikuti organisasi adalah adanya keaktipan mereka dalam kegiatan masyarakat.

Sementara itu menurut divisi teknis pemilu, sosialisasi dan Humas mengatakan bahwa:

> Saat ini keaktipan pemilih pemula pada kegiatan organisasi bisa dilihat dari adanya keaktipan mereka dalam kegiatan yang diadakan oleh sekolahnya terutama kegiatan yang membina karakter dan kesadaran mereka dalam mengikuti kegaiatan di masyarakat terutama kegiatan yang terkait kepentingan masyarakat, selain itu keaktipan mereka dalam berorganisasi dapat juga dilihat dari antusiasnya mereka dalam mengikuti kegiatan yang diadakan. (selasa, 24 Juli 2018)

Keikutsertaan pemilih pemula pada kegiatan organisasi baik disekolah maupun di masyarakat seharusnya memberikan dampak sosial bagi mereka yakni dengan aktif pula pada kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat khususnya pada kegiatan sosial dan politik contohnya pada kegiatan yang diadakan oleh komisi pemilihan umum kota Bandung yaitu pemilihan wali kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada pemilih pemula terkait Pengalaman mereka mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi yang mereka ikuti, menurut mereka kegiatan yang mereka ikuti sangat beragam hal ini terbukti berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pemilih pemula di kota Bandung, ada yang mengikuti kegiatan Organisasi PMR, OSIS, ROHIS, dan mengikuti Organisasi lain diluar sekolah, namun ada juga yang tidak ikut kegiatan organisasi sama sekali hal ini dikarenakan karena mereka masih malas mengikuti kegiatan karena tidak ada minat pada kegiatan.

Pengalaman dalam mengikuti organisasi ini sangatlah penting karenaselain meningkatkan kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawab juga bisa menyadarkan mereka akan pentingnya mereka dalam pelaksanaan pemilihan wali KotaBandung, dari pengalaman mengikuti kegiatan organisasi ini pemilih pemula bisa saja sadar akan peranannya dan tanggung jawabnya sebagai warga kota Bandung, makanya pengalaman dalam mengikuti organisasi adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam mewujudkan tingkat partisipasi pemilih pemula ini khususnya pemilih pemula di Kota Bandung.